

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh:
SARAH QUROTUL AIN
NPM. 2216041091**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SARAH QUROTUL AIN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Lampung, yang menempatkan program pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Namun, bantuan modal usaha seringkali berhenti pada distribusi fisik tanpa diikuti oleh kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi Korten (1988), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program UEP menunjukkan ketidaksesuaian pada beberapa dimensi utama. Meskipun bantuan alat produksi telah sesuai dengan usulan kelompok, namun terjadi ketidaksesuaian pada pola kerja Dinas Sosial yang cenderung bersifat administratif prosedural, sehingga fungsi pendampingan pasca-distribusi tidak berjalan optimal. Hambatan utama ditemukan pada keterbatasan anggaran pengawasan, sistem monitoring yang belum terintegrasi, serta kendala teknis di tingkat lapangan yang menghambat operasional kelompok usaha. Kesimpulannya, program UEP telah mencapai target distribusi fisik, namun terdapat ketidaksesuaian yang mendalam dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi, Kesesuaian Program, Masyarakat Prasejahtera, Pemberdayaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTIVE ECONOMIC ENTERPRISE (UEP) PROGRAM AT THE LAMPUNG PROVINCIAL SOCIAL SERVICE

By

SARAH QUROTUL AIN

Poverty remains a serious problem in Lampung Province, which places economic empowerment programs as a top priority in its regional development agenda. However, business capital assistance often stops at physical distribution without being followed by sustainable economic independence for the beneficiaries. This study aims to analyze the implementation of the Productive Economic Enterprise (UEP) program at the Lampung Provincial Social Service and identify the factors that hinder it. This study uses a qualitative approach with Korten's (1988) implementation model, with the results showing that the implementation of the UEP program is inconsistent in several key dimensions. Although the provision of production tools is in line with the groups' proposals, there is a mismatch with the Social Services Agency's work patterns, which tend to be administrative and procedural in nature, resulting in the post-distribution assistance function not running optimally. The main obstacles were found to be limited supervision budgets, an unintegrated monitoring system, and technical constraints at the field level that hampered the operations of the business groups. In conclusion, the UEP program has achieved its physical distribution targets, but there are deep discrepancies in creating sustainable economic independence for the community.

Keywords: *Economic Independence, Program Alignment, Low-Income Communities, Empowerment*

**IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Sarah Qurotul Ain

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA
EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Sarah Qurotul Ain

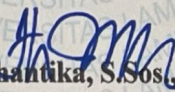
Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041091

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Ita Prihandika, S.Sos., M.A.
NIP. 198406302015042002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 197009142006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Penguji : Dodi Fedlulloh, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Sarah Qurotul Ain
NPM. 2216041091

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sarah Qurotul Ain, lahir di Kalirejo pada tanggal 15 Mei 2004. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Warsono Huyanto dan Ibu Erna Pujiastuti. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Ulul Abshor dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SDN Tanjung Raya hingga menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMPIT Insan Mulia hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019, yang kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Husnul Khotimah hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa studi, penulis aktif mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis tercatat sebagai staf anggota Bidang Sumber Daya Organisasi (SDO) pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Himagara) periode 2022–2024. Selain di tingkat jurusan, penulis juga berkontribusi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Lampung, diawali sebagai staf anggota Bidang Eksternal pada tahun 2023, hingga kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Divisi Eksternal pada periode kepengurusan berikutnya.

Sebagai implementasi dari disiplin ilmu yang ditekuni, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis juga telah menyelesaikan program Praktik

Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pengalaman praktik lapangan tersebut memberikan wawasan mendalam serta perspektif empiris bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.).

MOTTO

“Aku bukanlah produk dari situasiku. Aku adalah produk dari keputusan-keputusanku. Masalahnya bukanlah pada apa yang terjadi pada kita, melainkan pada respons kita terhadap apa yang terjadi pada kita”

(Stephen Covey)

“A man shall have nothing but what he strives for”

(QS. An-Najm: 39)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat kesehatan, serta kejernihan berpikir yang telah dikaruniakan, sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Besar harapan penulis agar karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi khalayak luas.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana saya ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Warsono dan Ibu Erna

Terima kasih atas cinta yang tak pernah surut, doa-doa yang melangit di setiap sujud, serta dukungan tanpa batas yang menjadi kekuatan terbesar bagi saya untuk menyelesaikan setiap anak tangga perjuangan ini. Karya ini adalah bentuk kecil bakti dan rasa syukur saya atas segala pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan.

Diri Sendiri

Untuk diriku, Sarah. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih atas ketangguhan, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus. *We finally made it!*

Dosen Pembimbing

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran, serta ilmu yang telah di curahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Arahan dan kritik membangun dari Ibu bukan hanya membentuk karya ini, tetapi juga membentuk pola pikir saya menjadi lebih kritis dan bijaksana.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada segenap dosen, staf, dan rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas segala dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamiin*. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa perjalanan menyelesaikan skripsi ini penuh dengan tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak terutama kedua orang tua tercinta yang menjadi sumber kekuatan utama segala hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga. Terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah Ibu berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lebih bermakna.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembahas saya yang telah memberikan kritik konstruktif, saran, serta masukan yang sangat mendalam dalam menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih atas ketelitian Bapak dalam menguji dan mengarahkan penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dengan lebih komprehensif, sistematis, dan terjaga kualitas akademiknya.
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah mendampingi, mengarahkan, dan memberikan

nasihat berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga masa penyelesaian studi. Terima kasih atas dukungan moral, kesabaran, serta bimbingan yang Bapak berikan selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.

4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pendamping Lapangan (DPL) pada pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan dedikasi terbaik serta curahan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna dan memberikan teladan luar biasa dalam dunia pendidikan.
8. Segenap staf jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai urusan administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pelayanan, dan keramahan yang diberikan, sehingga seluruh proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
9. Seluruh informan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas keramahan dan ketulusannya dalam berbagi ilmu serta pengalaman selama proses pengambilan data di lapangan. Tanpa bantuan dan keterbukaan Bapak serta Ibu sekalian, penelitian ini tidak akan dapat tersusun dengan baik. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi cerminan aspirasi kelompok sasaran demi kemajuan program UEP di masa depan.
10. Orang tua tercinta, Ibu dan Bapak. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan yang luar biasa, serta doa tulus yang tak pernah putus di setiap langkah penulis. Gelar ini adalah persembahan kecil untuk membalas

segala peluh dan cinta Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir batin untuk kalian.

11. Sahabat smooties (Ririn, Chika, Ajeng, Dian), terima kasih telah menjadi teman bertumbuh, berbagi suka duka, serta saling menguatkan hingga kita sampai di tahap ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang sangat berarti selama empat tahun ini.
12. Sahabat wacana (Salsa, Adel, Angel), terima kasih atas segala kebaikan, semangat, serta kenangan baik yang telah tercipta selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam berproses di kampus tercinta ini.
13. Sahabat info yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala keceriaan dan kehangatan yang telah kalian ciptakan bersama dengan penulis.
14. Vina Ida Matul Khoir, S.Sos., terima kasih atas dukungan dan semangatnya. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi penulis setelah meraih gelar lebih dulu, serta senantiasa mendampingi hingga penulis sampai di titik ini.
15. Teman-teman KKN Desa Suban 2025, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga selama masa pengabdian. Terima kasih telah menjadi keluarga baru dan memberikan banyak pelajaran hidup yang bermakna bagi penulis.
16. Teman-teman Ampatra, terima kasih atas solidaritas dan perjuangan bersama di FISIP Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi rekan belajar yang luar biasa dan memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Penulis

Sarah Qurotul Ain

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik	10
2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.4 Usaha Ekonomi Produktif	19
2.5 Tinjauan Kemiskinan	21
2.6 Kerangka Berpikir	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung	36
4.2 Gambaran Umum Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	37
4.3 Hasil Penelitian	40
4.3.1 Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung	40
4.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung	62

4.4 Pembahasan.....	65
4.4.1 Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung	66
4.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	90
V. KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Implikasi	95
5.3 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Penerima Bantuan	3
2. Data Jumlah Penerima Jenis Bantuan	4
3. Informan Penelitian.....	29
4. Matriks Hasil Analisis Penelitian.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	25
2. Struktur Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	37
3. Penyaluran Bantuan UEP di Desa Tiyuh Margo Mulyo 2024.....	43
4. Lokasi Usaha KUBE Delima di Kelurahan Karang Jaya.....	55
5. Lokasi Usaha KUBE Modista di Kelurahan Iringmulyo.....	55
6. Lokasi Usaha KUBE Sinar Jaya di Kelurahan Mekar Jaya.....	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian strategi dan inisiatif yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah secara terstruktur dan terorganisir, serta melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dengan tujuan utama menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf hidup warga negara (BPHN, 2010). Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan suatu pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh penduduk. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas aktor dalam upaya mengatasi kemiskinan, sehingga kebijakan yang dirancang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga dipahami sebagai proses pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan akses terhadap pelayanan dasar (Dimas, 2025).

Angka kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih tergolong tinggi, yakni mencapai 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25 persen pada tahun 2025 (BPS, 2025). Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional adalah Provinsi Lampung. Data Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 berada pada angka 9,66 persen dengan jumlah sekitar 860,13 ribu orang, sedikit di atas angka kemiskinan nasional. Pada periode sebelumnya, tingkat kemiskinan di Lampung tercatat sebesar 10,00 persen pada Maret 2025 dan 10,62 persen pada September 2024, yang berarti terjadi penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, namun secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih cukup besar dan mencerminkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan struktural yang membutuhkan perhatian serta kebijakan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Salah satu bentuk bantuan sosial yang berfokus pada pemberdayaan adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, program ini hadir guna mendukung keluarga miskin dalam mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan penghasilan. Program ini dirancang sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial yang bersifat transformatif, dimana penerima manfaat tidak hanya diposisikan sebagai objek bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang didorong untuk mengembangkan kapasitas ekonomi rumah tangga. Bantuan ini diberikan dalam bentuk modal usaha dan pendampingan kepada keluarga miskin agar dapat mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan tidak hanya berupa bantuan, tetapi juga pemberdayaan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hadir sebagai kebijakan yang menekankan penguatan kapasitas ekonomi keluarga miskin melalui bantuan modal, pendampingan, dan pembinaan. Dalam penanganan

fakir miskin, pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjadi penyempurnaan kebijakan UEP. Program ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada KUBE, yaitu kelompok keluarga miskin yang terbentuk secara mandiri untuk menjalankan usaha produktif. Peraturan tersebut menunjukkan pergeseran pendekatan, dimana fokus bantuan tidak lagi hanya pada individu, melainkan pada kelompok usaha bersama. UEP kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah termasuk Dinas Sosial Provinsi Lampung sejak tahun 2022, melalui tahapan seleksi penerima, penyaluran modal, hingga pendampingan agar usaha dapat berkembang secara mandiri.

Beberapa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung meliputi penyediaan sarana dan prasarana usaha yang beragam, antara lain mesin jahit, mesin steam motor, mesin las, ternak kambing, serta depot air minum (Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025). Bantuan tersebut disalurkan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan usaha produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan penerima manfaat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima bantuan secara berkelanjutan. Berikut ini data penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data Jumlah Penerima Bantuan

No.	Tahun Pelaksanaan	Kelompok Penerima
1	2022	22
2	2023	190
3	2024	53
4	2025	34

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025

Tabel di atas menyebutkan pada tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan bantuan kepada 22 kelompok penerima, pada tahun 2023 jumlah kelompok sasaran meningkat drastis karna banyaknya permintaan yang dituntut oleh KUBE yaitu sebanyak 190 kelompok. Di tahun 2024 jumlah kelompok penerima kembali menurun yaitu sebanyak 53 kelompok, dan pada tahun 2025

sebanyak 34 kelompok. Jumlah kelompok sasaran per tahun menurut jenis bantuannya akan dirincikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah Penerima Jenis Bantuan

No.	Tahun	Ternak Kambing	Mesin Jahit	Mesin Steam motor	Pengelolaan Air Minum	Mesin Las
1	2022	10	7	5	-	-
2	2023	13	80	65	14	18
3	2024	-	25	18	3	7
4	2025	-	12	10	5	7

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025

Selama periode 2022 hingga 2025, program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Provinsi Lampung menunjukkan distribusi bantuan yang cukup merata di berbagai kabupaten/kota dengan jenis bantuan yang beragam, meliputi ternak kambing, mesin jahit, mesin steam motor, pengelolaan air minum, dan mesin las. Pada tahun 2022, bantuan didominasi oleh ternak kambing dengan penerima terbanyak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan mesin jahit dan mesin steam motor tersebar di sejumlah kabupaten seperti Lampung Tengah, Mesuji, Way Kanan, dan Pesisir Barat. Pada tahun 2023, jumlah penerima meningkat pesat terutama pada bantuan mesin steam motor yang mencapai 65 kelompok dengan konsentrasi terbesar di Pringsewu dan Lampung Timur, disusul bantuan mesin jahit, pengelolaan air minum, serta mesin las yang juga banyak tersalurkan di Pringsewu. Selanjutnya, tahun 2024 menunjukkan fokus utama pada mesin jahit dengan penerima terbanyak di Kabupaten Pringsewu, serta mesin steam motor, pengelolaan air minum, dan mesin las yang tersebar di beberapa kabupaten lain. Sementara itu, pada tahun 2025 bantuan tetap berlanjut dengan distribusi mesin jahit, mesin steam motor, pengelolaan air minum, dan mesin las yang menysasar berbagai kabupaten/kota, dengan penerima relatif merata antara Pringsewu, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, dan kabupaten lainnya. Secara keseluruhan, distribusi bantuan UEP menunjukkan keterlibatan hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan variasi jenis bantuan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Analisis pra-riset menegaskan adanya kelemahan sistemik yang menghambat implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Dinas Sosial Provinsi

Lampung. Berdasarkan hasil wawancara pada 12 September 2025 dengan Ibu Rohaeni selaku pelaksana program usaha ekonomi produktif dan Bapak Shoulthan sebagai pendamping, permasalahan utama berpusat pada kualitas pendampingan yang lemah dan ketiadaan standar monitoring dan evaluasi yang baku, diperparah dengan hilangnya kontak interaksi dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) justru setelah usaha kelompok terindikasi gagal. Kesenjangan yang teridentifikasi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar pada dimensi proses implementasi. Anggapan bahwa keberhasilan program hanya diukur dari tersalurkannya bantuan (*output*) terbukti tidak memadai karena keterbatasan sumber operasional dan hilangnya kontak interaksi berdampak langsung pada rendahnya tingkat keberlanjutan usaha (*outcome*). Pola kegagalan ini diperkuat oleh temuan studi terdahulu yaitu oleh Rizky (2025) yang mencatat adanya pemantauan yang tidak menyeluruh, Melik dkk. (2022) menunjukkan rendahnya efektivitas program bimbingan sosial dan kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana, dan Ufah (2023) menyoroti minimnya kesadaran penerima manfaat. Kumpulan data empiris ini secara tegas menunjukkan kerentanan implementasi UEP terjebak pada mentalitas *top-down*. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa kegagalan tersebut merupakan kegagalan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran yang menjadikan Dinas Sosial Provinsi Lampung gagal menjadikan kegagalan KUBE sebagai umpan balik untuk melakukan pembelajaran dan revisi struktur program.

Kesenjangan yang teridentifikasi menunjukkan adanya persoalan mendasar pada dimensi proses implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Diperlukan analisis yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan akar ketidaksesuaian antara program dengan realitas di lapangan. Penelitian ini akan menggunakan teori implementasi Korten (1988). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan seperti UEP, sangat bergantung pada proses implementasi yang adaptif dan partisipatif, yang ia sebut sebagai model pembelajaran dan adaptasi (*learning and adapting*). Kerangka implementasi Korten (1988) sangat relevan karena berfokus pada pentingnya kesesuaian yang berkelanjutan. Dengan menggunakan teori ini, maka akan dapat dikaji bagaimana kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program

dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Dengan menggunakan kerangka teori ini permasalahan-permasalahan yang ada akan di analisis dengan komprehensif terkait implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Melihat kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung”**. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program UEP di Provinsi Lampung, di samping menganalisis kendala-kendala yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang implementasi kebijakan dan program-program berbasis pemberdayaan. Secara khusus, studi ini memiliki potensi untuk memperkaya disiplin ilmu melalui penerapan dan pengujian model implementasi yang dikemukakan oleh Korten (1988) dalam ranah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Temuan dari analisis ini akan berfungsi sebagai rujukan akademis bagi penelitian berikutnya yang berfokus

pada proses implementasi program pemberdayaan ekonomi di sektor publik, khususnya saat mengulas urgensi keselarasan antar komponen program

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi mendalam dan umpan balik yang konstruktif terkait implementasi program UEP. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendampingan, monitoring, dan evaluasi program di masa depan, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha mereka. Informasi ini dapat memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan bantuan dan berinteraksi dengan pihak pelaksana.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi sumber data dan studi kasus yang relevan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik pada isu kemiskinan, implementasi kebijakan sosial, atau program pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini esensial untuk memperkuat kerangka teori yang dipakai dalam menganalisis studi yang sedang berjalan, sekaligus sebagai penegas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diangkat.

Rizky (2025) menyampaikan bahwa hasil penelitian di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diwarnai oleh beberapa dinamika, termasuk keterlambatan pencairan dana, kurangnya transparansi seleksi, dan pemantauan yang tidak menyeluruh oleh dinas terkait. Dinamika ini menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi, terjadi peningkatan kapasitas usaha kecil dan mikro, namun di sisi lain, muncul ketergantungan penerima bantuan, ditemukannya penyimpangan penggunaan barang, serta masalah kurangnya transparansi data yang diberikan penerima. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara tujuan program dan pelaksanaannya di lapangan.

Ufah (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung pada tahun 2021 belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari kinerja yang belum memadai pada tiga dimensi evaluasi, yakni masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*). Berbagai kendala yang teridentifikasi meliputi keterbatasan anggaran, kurang efektifnya

pelaksanaan bimbingan sosial, rendahnya pemahaman penerima manfaat dalam menjalankan UEP, serta minimnya kesadaran dari kelompok sasaran.

Melik dkk. (2022) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dinilai belum optimal karena adanya kendala pada empat faktor Edward III. Meskipun komunikasi kebijakan sudah jelas, implementasi terhambat oleh kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana. Dimensi sumber daya terganggu oleh ketidakmerataan pemahaman akibat tingkat pendidikan anggota yang rendah. Selanjutnya, faktor disposisi menunjukkan rendahnya kesadaran dan komitmen sebagian pelaksana lapangan. Terakhir, pada dimensi struktur birokrasi, kurangnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penghambat kelancaran kerja. Secara keseluruhan, ketidakefektifan ini bersumber dari kelemahan internal pada kapasitas dan kesiapan para implementor.

Olii dkk. (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program ekonomi produktif pada Organisasi Pemuda Bakti Muda, Desa Ibarat Anggrek, Gorontalo Utara berjalan melalui empat tahap, yakni kesadaran melalui diskusi dan sosialisasi, perencanaan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan rencana, implementasi berupa pelatihan dan pelaksanaan usaha, serta evaluasi yang meliputi pengembangan usaha dan partisipasi komunitas. Faktor pendukung mencakup ketersediaan modal, dukungan berbagai pihak, dan jaringan pemuda yang luas, sementara hambatan berupa ketidakteraturan keikutsertaan anggota dan perputaran modal yang terhambat akibat kesibukan pengurus.

Sukirman dkk. (2021) temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi program UEP terhambat oleh tiga permasalahan utama yaitu sosialisasi yang tidak optimal, ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan spesifik penerima, serta kelemahan pada pendampingan pasca-penyyaluran. Disarankan agar program di masa mendatang melakukan perbaikan mendasar, terutama melalui penyampaian sosialisasi yang komprehensif kepada seluruh instansi pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, diperlukan verifikasi ulang kebutuhan penerima bantuan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik lingkungan usaha mereka.

Kajian terdahulu mengenai implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah banyak dilakukan, menunjukkan dinamika umum seperti keterlambatan pencairan, masalah transparansi data, hambatan pada kinerja *input*, *process*, *product*, serta kendala klasik pada dimensi sumber daya dan disposisi pelaksana. Namun, penelitian-penelitian tersebut mayoritas menggunakan kerangka evaluasi kinerja atau model implementasi *top-down* seperti Edward III. Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan berfokus pada implementasi adaptif di lingkungan birokrasi Dinas Sosial Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini secara eksplisit menggunakan teori implementasi Korten (1988) yang memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap tiga dimensi kesesuaian program dengan partisipan, program dengan organisasi, dan partisipan dengan organisasi. Penggunaan teori Korten (1988) akan melampaui deskripsi kendala dan Edward III, memungkinkan peneliti mengurai akar penyebab kegagalan adaptasi organisasi pelaksana dalam merespons kebutuhan dan keberlanjutan usaha kelompok, yang merupakan kunci untuk mengubah program bantuan menjadi upaya pengentasan kemiskinan struktural yang berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk menguraikan, membenarkan, mengarahkan, atau memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan (Suaib dkk., 2022). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah, ketentuan ini terkait dengan proses pengambilan keputusan yang diarahkan untuk melaksanakan sebuah tindakan tertentu (Dewi, 2022). Kebijakan ini dibuat oleh para pemegang mandat yang diberikan oleh masyarakat sebagai wakil dari sebagian besar warga.

Definisi mengenai kebijakan publik memiliki cakupan yang bervariasi di kalangan ilmuwan administrasi publik dan bergantung pada fokus analisisnya. Dye (2013) menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral, mengartikan kebijakan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau dihindari, menekankan pada fungsi dan intensi negara dalam mengelola konflik dan mendistribusikan layanan. Sementara itu Chakrabarty & Chand (2012) memecah

istilah tersebut, fokus pada kata “publik” yang harus merefleksikan kepentingan yang sama secara kolektif, membedakan kebijakan publik dari tindakan yang hanya didasarkan pada kepentingan pribadi. Cakupan kebijakan diperluas oleh Cochran *et al.* (1999) yang mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berarti kebijakan tidak terbatas hanya pada pembentukan peraturan hukum saja, melainkan mencakup semua langkah praktis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama (Suaib, 2022).

Keragaman definisi tersebut menghasilkan dampak signifikan pada cara suatu kebijakan diimplementasikan dan dievaluasi. Pandangan Dye (2013) yang menekankan pada intensi dan fungsi negara cenderung menghasilkan pemahaman bahwa kebijakan sudah berhasil selama pemerintah telah mengambil tindakan. Namun, pandangan ini ditantang oleh definisi Chakrabarty & Chand (2012) serta Cochran *et al.* (1999). Pergeseran fokus tersebut mewajibkan kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai *output* hukum formal, melainkan sebagai serangkaian tindakan nyata yang harus diukur berdasarkan kepentingan bersama (*common interest*). Jika kebijakan hanya diukur berdasarkan *output*, maka ia mengabaikan aspek dinamis dan relasional yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kerangka definisi ini mendorong ilmuwan administrasi untuk tidak lagi puas hanya dengan menguji apakah pemerintah sudah bertindak, tetapi bagaimana tindakan tersebut menghasilkan kesesuaian dan keberlanjutan bagi publik yang dituju. Hal ini menjadi landasan mengapa studi implementasi harus berpindah dari model yang statis ke model yang adaptif untuk memastikan kebijakan benar-benar melayani kepentingan kolektif publik.

Menyimpulkan dari pengertian-pengertian mengenai kebijakan publik, kebijakan publik memiliki beberapa elemen penting yaitu kebijakan publik merupakan hasil keputusan atau tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik diarahkan untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama masyarakat, bukan hanya kepentingan individu. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur tindakan, mengelola konflik, mengorganisasi masyarakat, serta mendistribusikan sumber daya dan juga layanan. Implementasi elemen-elemen tersebut tidak terjadi dalam satu waktu melainkan

melalui serangkaian tahapan sistematis. Dalam konteks ini Dunn (2018) dalam Bregi (2024) menguraikan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah proses dinamis yang mencakup beberapa fase krusial mulai dari penyusunan agenda hingga penilaian hasil. Beberapa fase tersebut yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda menjadi langkah awal dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Pada tahap ini, terbuka kesempatan luas untuk menganalisis isu-isu publik secara mendalam dan menentukan hierarki prioritas yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda resmi. Proses ini memiliki arti penting karena berperan sebagai penentu utama dalam menilai apakah suatu masalah publik pantas untuk dinaikkan ke agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan

Setelah penyusunan agenda selesai, tahapan selanjutnya melibatkan diskusi mendalam tentang masalah yang sudah tercantum dalam daftar agenda kebijakan, bersama dengan para pejabat yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Di fase perumusan, muncul beragam alternatif solusi yang kemudian dinilai dan dipilih sebagai kebijakan utama guna mengatasi tantangan yang ada.

3. Adopsi/Legitimasi

Tahap legitimasi dimaksudkan untuk memberikan otoritas resmi pada mekanisme utama pemerintahan. Melalui legitimasi ini, alternatif kebijakan yang telah dirumuskan akan mendapatkan landasan dari dukungan mayoritas di legislatif, kesepakatan antarlembaga, atau keputusan pengadilan, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara sah.

4. Implementasi

Implementasi adalah fase krusial dimana kebijakan yang telah disahkan mulai dijalankan secara nyata oleh lembaga pemerintah. Ini adalah jembatan yang mengubah rencana formal menjadi aksi konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Keberhasilan implementasi memerlukan upaya kompleks, seperti pengalokasian sumber daya, penyusunan prosedur, dan pembentukan struktur pelaksana yang efektif.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap penilaian menyeluruh terhadap suatu kebijakan, mencakup substansi, proses implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Tahapan ini harus dilakukan sepanjang siklus kebijakan, bukan hanya di akhir program. Tujuannya adalah menjadi mekanisme pembelajaran yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi, sekaligus memberikan umpan balik korektif agar kebijakan tetap relevan dan adaptif.

Penelitian ini secara spesifik memilih fokus pada implementasi program UEP dibandingkan tahap kebijakan lain karena implementasi merupakan titik kritis dimana kebijakan bertemu realitas lapangan. Meskipun kebijakan UEP mungkin dirumuskan dengan baik, kendala klasik seperti keterlambatan pencairan dan masalah transparansi hanya muncul dan dapat dianalisis secara mendalam pada tahap pelaksanaannya. Dengan meneliti implementasi khususnya melalui lensa implementasi adaptif Korten (1988), penelitian ini bertujuan mengurai akar kegagalan adaptasi birokrasi pelaksana. Pemahaman mendalam ini esensial karena kegagalan adaptasi pada tingkat implementasi adalah penghalang utama yang mencegah program bantuan struktural ini bertransformasi menjadi upaya pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Mazmanian & Sabatier (1979) mengartikan implementasi kebijakan sebagai fase kritis dalam siklus kebijakan publik, didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi setelah perumusan program dinyatakan berlaku (Wahab, 2021). Kajian implementasi tidak terbatas pada usaha-usaha administratif untuk menjalankan pedoman, melainkan secara esensial mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan menimbulkan dampak atau konsekuensi nyata pada kondisi masyarakat sasaran. Definisi ini selaras dengan pandangan Friedrich (1975), yang melihat kebijakan sebagai langkah-langkah yang diajukan untuk mengatasi kendala-kendala guna mewujudkan sasaran (Sutmasa, 2021). Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai upaya intervensi dan pengaturan terhadap elemen-elemen spesifik dalam masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna menghasilkan efek nyata (*to give practical effect to*).

Perbedaan mendasar ini menghasilkan dua konsekuensi evaluasi yang berbeda. Jika implementasi dipandang sempit sebagai usaha-usaha administratif saja, maka keberhasilan diukur dari kepatuhan birokrasi dalam menghabiskan anggaran dan menyelesaikan prosedur (*output*). Namun, pandangan yang lebih komprehensif menuntut implementasi harus dinilai berdasarkan dampak akhir (*outcome*) yang dirasakan publik (Silitonga, 2022). Implementasi kebijakan secara mendasar melibatkan tiga unsur utama yaitu sasaran yang hendak dicapai, serangkaian aktivitas pencapaiannya, serta capaian atau luaran dari kegiatan tersebut. Kebijakan akan kehilangan relevansinya dan menjadi sekadar dokumen formal tanpa substansi nyata jika pelaksana hanya fokus pada penyediaan sarana tanpa menghasilkan efek nyata di masyarakat. Oleh karena itu, studi implementasi harus berpindah dari sekadar menguji kepatuhan pelaksana model *top-down* menuju pembedahan proses dinamis dan adaptif yang memastikan kebijakan mampu mengatasi isu-isu yang ada dan mewujudkan tujuan yang dirancang.

Pemahaman mendalam mengenai proses implementasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis memerlukan dukungan model teoretis yang komprehensif. Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan publik yang memberikan penjelasan sistematis mengenai mekanisme transformasi kebijakan menjadi hasil nyata di masyarakat.

1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)

Menurut teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, variasi yang terjadi dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat-sifat kebijakan yang sedang diterapkan, sebagaimana dijelaskan oleh Djohanis dkk. (2024). Mereka kemudian mengajukan sebuah pendekatan yang menghubungkan masalah-masalah kebijakan dengan tahapan implementasinya, serta menyusun model konseptual yang mengkaitkan kebijakan dengan hasil kinerja. Dalam model tersebut, elemen-elemen seperti perubahan, kontrol, dan kepatuhan ditekankan sebagai aspek krusial dalam prosedur implementasi. Sejalan dengan pandangan ini, Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mewujudkan

target yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Pada model ini beberapa variabel utama turut memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan: variabel ini berfungsi untuk mengarahkan pelaksana kebijakan agar selaras dengan program yang direncanakan. Standar dan tujuan tidak berdampak langsung pada disposisi pelaksana, melainkan melalui komunikasi antarorganisasi.
- 2) Sumber daya: dalam proses implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya yang cukup baik berupa tenaga manusia maupun non-manusia merupakan elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan keseluruhan. Tanpa dukungan ini, upaya untuk mewujudkan kebijakan sering kali menemui hambatan yang signifikan.
- 3) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan: implementasi berjalan efektif jika terdapat ketepatan komunikasi dengan pelaksana, serta konsistensi dalam penyampaian standar dan tujuan kebijakan melalui berbagai sumber informasi.
- 4) Karakteristik organisasi pelaksana: komponen ini mencakup serangkaian elemen internal dalam organisasi, meliputi struktur birokrasi yang menjadi kerangka kerja formal, norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku kolektif, serta pola hubungan yang terbentuk di antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
- 5) Sikap para pelaksana: sikap (disposisi) individu atau organisasi menjadi faktor esensial dalam proses implementasi kebijakan. Disposisi ini terdiri dari beberapa dimensi utama, yang meliputi aspek kognitif, yaitu sejauh mana pemahaman dan komprehensi yang dimiliki terhadap substansi kebijakan, bentuk respons terhadap kebijakan tersebut, yang dapat bervariasi antara penerimaan, sikap netral, atau bahkan penolakan, serta tingkat intensitas dari respons yang ditunjukkan.
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik: faktor-faktor ini adalah penentu eksternal keberhasilan implementasi, dimana kondisi ekonomi memengaruhi sumber daya, kondisi sosial mencerminkan dukungan publik dan budaya, dan kondisi

politik menentukan stabilitas dan dukungan elit yang secara kolektif bisa mendukung atau menghambat jalannya kebijakan.

2. Model Implementasi Edward III (1984)

Salah satu kerangka teoretis mengenai implementasi kebijakan publik yang terkemuka diperkenalkan oleh Edward III (1984). Model ini dikembangkan dengan tujuan spesifik untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor krusial yang secara langsung memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam tahap pelaksanaannya. Edward III (1984) merumuskan model implementasi yang didasarkan pada empat variabel utama yang secara kolektif diyakini menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Keempat variabel penentu tersebut meliputi:

- 1) Komunikasi: komunikasi merupakan variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan, mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman yang akurat dari para pelaksana mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara spesifik, pemahaman yang memadai ini harus mencakup penjabaran yang jelas mengenai tujuan dan sasaran utama dari kebijakan yang sedang diterapkan.
- 2) Sumber Daya: variabel ini memegang peranan yang sangat krusial, implementasi kebijakan yang berhasil mensyaratkan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan. Sumber daya ini mencakup tiga elemen fundamental yaitu manusia (SDM), material, dan metode. Apabila dukungan dari ketiga elemen utama tersebut tidak kuat atau tidak memadai, maka pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan akan menjadi sebuah tantangan serius, bahkan dapat menghambat realisasi secara keseluruhan.
- 3) Disposisi/Sikap: disposisi merupakan faktor krusial yang secara substansial menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Konsep disposisi ini merujuk pada serangkaian karakteristik dan sikap internal yang melekat pada individu-individu yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian, kualitas disposisi yang dimiliki oleh para *implementor* akan

memengaruhi secara signifikan dinamika dan capaian akhir dari keseluruhan proses implementasi.

- 4) Struktur Birokrasi: struktur birokrasi mengacu pada karakteristik, norma, dan pola interaksi yang berulang dalam Lembaga-lembaga eksekutif yang secara nyata maupun potensial memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai tatanan yang mengatur pedoman kerja dan menjabarkan wilayah tanggung jawab setiap aparatur pelaksana kebijakan.

3. Model Implementasi Korten (1988)

Model implementasi yang dikembangkan oleh Korten (1988) mengonseptualisasikan pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah mekanisme untuk menyalurkan layanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, proses implementasi dimaknai sebagai pembelajaran sosial yang dijalankan secara kolaboratif, melibatkan sinergi antara birokrasi pada tingkat lokal dengan komunitas atau kelompok sasaran yang dituju. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah memberdayakan komunitas agar mampu mencapai kemandirian dan kapasitas berkelanjutan (*self-sustaining capacity*) (Anirwan, 2025). Secara teoretis, pandangan ini berpusat pada premis bahwa keberhasilan pelaksanaan program merupakan fungsi langsung dari keselarasan optimal di antara tiga elemen inti. Inti dari Model Korten (1988) ini menekankan perlunya kesesuaian timbal balik antara program itu sendiri, organisasi pelaksana program, dan kelompok sasaran program (Bahri dkk., 2020). Korten (1988) lebih lanjut menegaskan bahwa tercapainya kesesuaian yang saling mendukung dari ketiga komponen tersebut merupakan prasyarat fundamental yang menentukan efektivitas dan keberhasilan program saat diimplementasikan di lapangan. Ketiga unsur utama yang membentuk model implementasi Korten (1988) tersebut adalah:

- 1) Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran: kesesuaian merujuk pada keselarasan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dengan kata lain, hasil dari suatu program harus dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara nyata oleh kelompok yang menjadi sasaran manfaat. Ketercapaian ini menjadi krusial agar keluaran

program benar-benar relevan dengan kebutuhan kelompok yang dilayani oleh organisasi pelaksana.

- 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana: kesesuaian dalam konteks pelaksanaan program merujuk pada keterkaitan antara tugas yang dituntut oleh program dengan kapabilitas organisasi pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas pelaksana untuk melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program. Indryani & Mulyadi (2022) menjelaskan bahwa kemampuan organisasi pelaksana mencakup beberapa aspek penting, yaitu memiliki pemahaman dan pendalaman yang kuat terhadap maksud dan tujuan program, kemampuan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, serta kesanggupan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung layanan program.
- 3) Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana: kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana menunjukkan adanya keterkaitan antara kebutuhan yang diungkapkan oleh pihak penerima program dengan proses penetapan keputusan oleh organisasi pelaksana. Artinya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebutuhan yang disampaikan oleh kelompok sasaran dengan keputusan yang diambil oleh pihak pelaksana.

Ketidakselarasan pada salah satu aspek tersebut secara langsung akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, kegagalan dalam menyelaraskan *output* program dengan kebutuhan kelompok sasaran akan berujung pada produk yang tidak termanfaatkan. Demikian pula, jika organisasi pelaksana tidak memiliki kapabilitas yang sebanding dengan tugas yang disyaratkan oleh program, organisasi tersebut tidak akan mampu menyampaikan *output* secara akurat. Terakhir, jika kelompok sasaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi pelaksana, mereka tidak akan memperoleh manfaat program. Oleh karena itu, Korten (1988) menyimpulkan bahwa kesesuaian yang mutlak antara ketiga unsur tersebut merupakan prasyarat esensial untuk menjamin program berjalan sesuai dengan rencana strategisnya (Sobirin, 2023).

Penelitian ini akan menggunakan model implementasi Korten (1988). Pilihan ini didasari oleh adanya kesenjangan empiris yang krusial dalam implementasi program UEP di Lampung, yakni fenomena hilangnya kontak interaksi pada fase krusial pasca-penyaluran modal. Kesenjangan ini membuktikan bahwa masalah implementasi bukanlah masalah *input* sederhana. Model implementasi terdahulu seperti Edward III yang bersifat statis dan *top-down*, secara inheren tidak mampu menjelaskan kegagalan ini, sebab Edward III hanya menganalisis kegagalan berdasarkan kondisi awal seperti kurangnya sumber daya atau komunikasi di awal program. Model tersebut gagal menangkap kegagalan dinamis yang muncul setelah program berjalan yaitu kegagalan organisasi untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masalah baru.

Teori Korten menawarkan perspektif yang lebih relevan dan holistik yaitu pendekatan pembelajaran dan adaptasi (*learning and adapting*). Model ini menolak proses linier implementasi, melainkan menuntut adanya kesesuaian berkelanjutan (*fit*) antara elemen program partisipan (KUBE), dan organisasi pelaksana (Dinas Sosial). Teori ini dipilih karena kemampuannya untuk mengkaji secara mendalam mengapa kesenjangan adaptasi terjadi. Fokus kritisnya adalah mengapa Dinas Sosial gagal menjadikan kegagalan KUBE sebagai umpan balik untuk merevisi SOP dan mengalokasikan sumber daya operasional (adaptasi), dalam rangka mencapai kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana yang berkelanjutan.

2.4 Usaha Ekonomi Produktif

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ditetapkan sebagai instrumen utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019. Regulasi ini mendefinisikan UEP sebagai serangkaian kegiatan yang berorientasi pada perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapabilitas usaha, produktivitas kerja, dan penghasilan, dengan tujuan strategis mendorong kemandirian ekonomi masyarakat rentan. Secara formal, UEP diklasifikasikan sebagai bantuan sosial yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu himpunan keluarga prasejahtera beranggotakan minimal lima kepala keluarga yang terbentuk atas inisiatif dan

kemandirian anggota untuk menjalankan usaha sejenis. Regulasi ini secara tegas menempatkan UEP bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sarana untuk memitigasi ketergantungan pada bantuan dan mendorong kontribusi penciptaan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, realitas empiris di tingkat nasional menunjukkan bahwa beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah termasuk UEP sering terjebak pada dilema implementasi yang menggagalkan tujuan utamanya mentransformasi masyarakat miskin dari ketergantungan konsumtif menjadi pelaku ekonomi yang produktif (Halim & Hakim, 2024). Kajian empiris di berbagai wilayah Indonesia secara konsisten menyoroti adanya kegagalan keberlanjutan (*sustainability gap*) yang akut, dimana modal stimulan UEP gagal berujung pada kemandirian usaha karena kelemahan dukungan pasca-penyaluran dan ketidaksesuaian antara jenis bantuan dengan kompetensi penerima dan potensi pasar (Sukirman dkk., 2021). Kritik ini menempatkan UEP pada posisi rentan, dimana ia berisiko hanya menjadi program penyaluran *output* tanpa menghasilkan *outcome* struktural.

Menurut pandangan global, kegagalan ini kontras dengan model pemberdayaan kemiskinan berbasis aset seperti pendekatan kelulusan (*graduation approach*) yang terbukti efektif oleh lembaga internasional seperti *Bangladesh Rural Advancement Committee* (BRAC). Studi empiris global menegaskan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada intervensi non-finansial yang intensif dan berkelanjutan meliputi *coaching* bisnis, pendampingan kesehatan, dan peningkatan literasi selama periode minimal dua tahun (Islam, 2019). Pola ini berbanding terbalik dengan kecenderungan implementasi program di Indonesia yang sering kali bersifat seragam dan kaku, mengabaikan perlunya adaptasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa kegagalan implementasi UEP di Dinas Sosial Provinsi Lampung bukan sekadar masalah teknis penyaluran dana, melainkan kegagalan organisasi negara dalam mengadopsi prinsip interaksi berkelanjutan dan adaptif yang menjadi prasyarat global untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan struktural.

2.5 Tinjauan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi topik yang menarik untuk dipelajari seiring dengan kemajuan ilmu sosial. Proses industrialisasi yang pesat dan munculnya berbagai konsep pembangunan ekonomi memicu berbagai penelitian sosial, terutama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Studi mengenai kemiskinan di Indonesia mencapai puncak perhatian ketika pemerintah orde baru secara intensif melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dimaknai sebagai kondisi dimana terdapat ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat makanan maupun non-makanan, yang pengukurannya didasarkan pada tingkat pengeluaran (Putri & Mukramin, 2023). Dengan kerangka definisi ini, terminologi “penduduk miskin” merujuk pada individu yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah ambang batas garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dirancang sebagai intervensi bantuan, namun efektivitasnya dalam jangka panjang seringkali terhalang oleh kegagalan implementasi di tingkat birokrasi, menjadikannya sekadar bantuan karitatif sementara. Untuk mentransformasi program ini menjadi upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penelitian ini secara fundamental berargumen bahwa masalah yang harus diatasi bukanlah sekadar kemiskinan insidental yang terjadi akibat bencana atau musibah, melainkan kemiskinan struktural. Fokus ini dipilih karena kegagalan adaptasi organisasi pelaksana mencerminkan masalah yang jauh lebih besar yaitu kegagalan sistem dalam menyediakan akses dan peluang yang setara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengurai kegagalan implementasi sebagai cerminan dari struktur dominasi yang ada, yang merupakan akar penyebab tidak berdayanya kelompok sasaran dalam jangka panjang.

Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan akibat dari super struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya (Arifin, 2020). Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta terpinggirkannya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan. Program UEP yang dirancang untuk memberikan modal usaha dan meningkatkan kapasitas seharusnya berfungsi sebagai intervensi struktural yang memberikan akses dan daya kreasi kepada kelompok terpinggirkan. Namun, kegagalan dalam implementasi yang akan dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil meruntuhkan struktur dominasi tersebut, melainkan hanya menjadi bantuan karitatif yang tidak berkelanjutan.

Fitriasari dalam Pulungan (2022) menyebutkan bahwa berdasarkan pandangan sejumlah ahli ekonomi, kemiskinan muncul dalam berbagai bentuk. Fenomena ini juga terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang, yang meliputi beberapa jenis kemiskinan berikut:

1. Kemiskinan absolut, didefinisikan sebagai suatu konsep yang membandingkan pendapatan individu dengan jumlah minimum yang disyaratkan untuk memenuhi kebutuhan hidup esensial. Batas pendapatan minimal ini, yang sering disebut sebagai garis kemiskinan, berfungsi sebagai pembeda tegas antara kondisi miskin dan tidak miskin. Secara fundamental, konsep ini berupaya untuk menetapkan tingkat pendapatan minimum yang memadai agar individu dapat memenuhi kebutuhan fisik dasar yang meliputi aspek pangan, sandang, hunian, kesehatan, dan pendidikan, sebagai prasyarat untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. Kemiskinan relatif, terjadi ketika pendapatan individu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penghasilan di lingkungan sekitar atau ketika ia menempati posisi terbawah dalam struktur sosialnya. Walaupun pendapatan tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok, seseorang tetap dikategorikan miskin karena perbedaan penghasilannya dengan standar sosial.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada suatu kondisi yang terkait dengan sikap budaya masyarakat yang cenderung menerima dan menginternalisasi kemiskinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari takdir atau pola hidup mereka. Akibat dari penerimaan budaya tersebut, kelompok ini sering kali menunjukkan minimnya respons atau upaya untuk memanfaatkan bantuan atau

intervensi yang ditawarkan oleh pihak eksternal, sehingga menghambat mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. Kemiskinan struktural, terjadi akibat ketidakmerataan struktur dan sistem ekonomi yang tidak memberikan keuntungan bagi kelompok miskin. Ini terjadi ketika struktur yang ada, seperti kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat miskin, monopoli sumber daya alam, atau kesenjangan akses terhadap pendidikan dan modal, secara sistematis menghalangi kelompok tertentu untuk berpartisipasi penuh dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kemiskinan dipahami sebagai persoalan yang bersifat multidimensional, dimana faktor penyebabnya melampaui sekadar kekurangan ekonomi. Berdasarkan perspektif ekonomi politik, kemiskinan merupakan akibat dari ketimpangan struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Secara struktural, kemiskinan sistemik disebabkan oleh ketidaksetaraan struktural dalam sistem kapitalisme yang berdampak pada pembagian sumber daya yang tidak adil, sebagaimana diuraikan oleh Marx (1867). Hal ini dimanifestasikan melalui faktor-faktor penghambat eksternal, seperti lemahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak (Meytriana dkk., 2025).

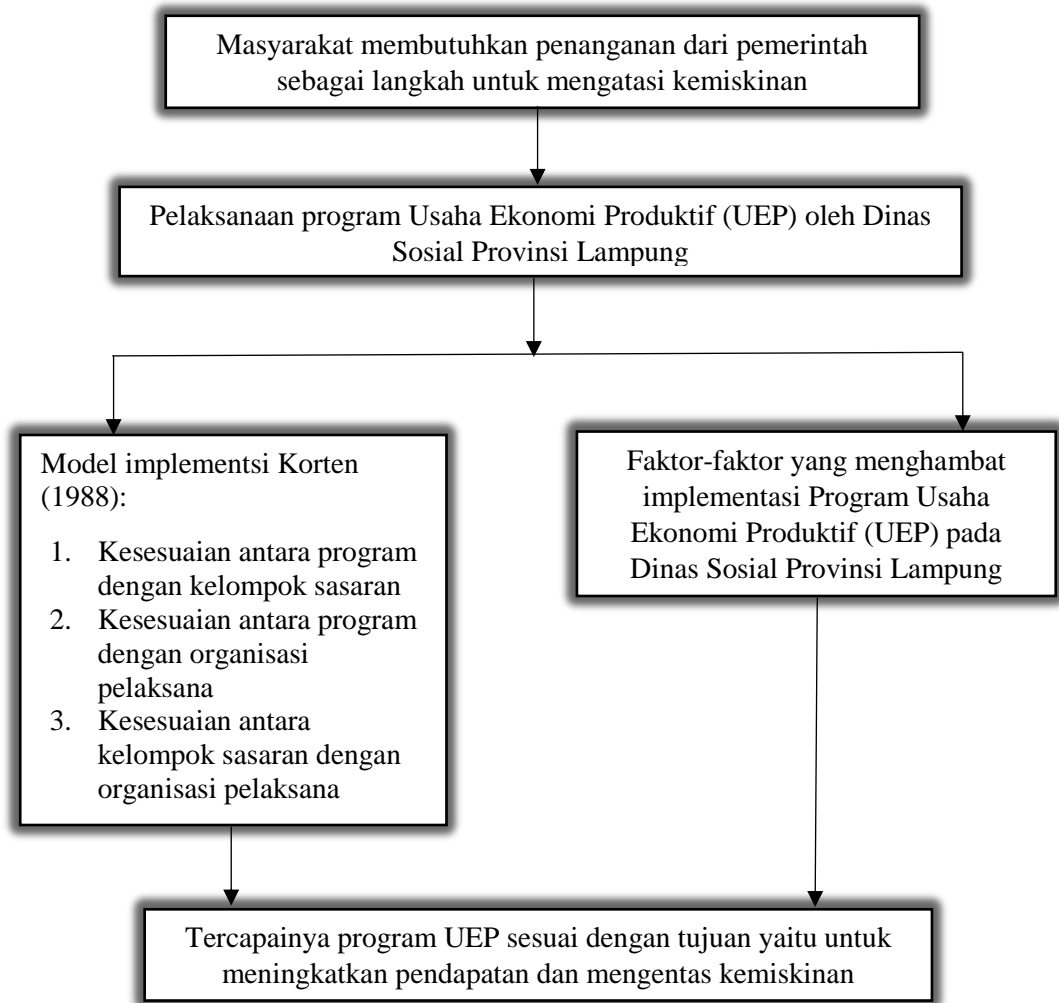
Selain itu, perspektif global dari teori sistem dunia (*world system theory*) menegaskan bahwa kemiskinan di suatu wilayah (periferi atau semi-periferi) merupakan konsekuensi logis dari integrasi ekonomi global yang timpang. Teori ini memandang dunia terbagi menjadi negara inti (*core*) yang mengeksploitasi dan negara pinggiran (*periphery*) yang menyediakan sumber daya murah (Sahban, 2018). Dalam kerangka ini, kemiskinan lokal di Indonesia diperparah oleh kebijakan global yang secara struktural mempertahankan posisi negara sebagai penyedia bahan baku atau tenaga kerja murah, sehingga membatasi kemampuan kelompok miskin untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Selain faktor eksternal, terdapat faktor yang berasal dari individu miskin maupun lingkungannya. Kemiskinan juga disebabkan oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan yang rendah atau hambatan budaya. Secara sosial, faktor seperti sikap fatalisme, apolitis, apatis, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi hambatan budaya yang turut berkontribusi terhadap

kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan adalah kondisi yang mencakup faktor internal individu serta faktor eksternal struktural dan politis yang menghalangi mereka dalam memanfaatkan peluang yang ada.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian harus memuat teori, dalil, atau konsep yang menjadi landasan teoretis, serta menguraikan variabel-variabel penelitian secara mendalam dan relevan dengan masalah yang dikaji. Oleh karena itu, kerangka pikir berfungsi esensial sebagai basis logis untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara penelitian (Syahputri dkk., 2023). Penelitian ini melihat pada kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung yang masih perlu untuk disorot oleh pemerintah. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan program UEP yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, dan Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai pelaksana di tingkat regional. Penelitian ini akan melihat implementasi program UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan menggunakan model implementasi Korten (1988) yang meliputi 3 unsur penting yaitu kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, serta kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Selain itu penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program UEP. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercapainya program UEP sesuai dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Berikut ini gambar alur kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu fenomena atau kejadian sebagaimana adanya di lapangan. Sesuai dengan definisi Subandi (2011), metodologi kualitatif merupakan prosedur riset yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun observasi terhadap tindakan dari suatu kebijakan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara holistik dan mendalam bagaimana program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diimplementasikan. Untuk mencapai kedalaman tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk berfokus pada konteks spesifik di lokasi studi, yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung, sehingga eksplorasi data dapat dilakukan secara intensif. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memperoleh pemahaman kontekstual, menganalisis implementasi program UEP secara holistik terutama yang berkaitan dengan tiga dimensi dalam kerangka Korten (1988), serta mengidentifikasi secara cermat faktor-faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program UEP.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan suatu batasan penelitian sehingga peneliti mampu menetapkan suatu keputusan yang tepat mengenai data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif

diperlukan suatu fokus penelitian yaitu rumusan masalah yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka penelitian ini akan berfokus pada:

1. Analisis implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan menggunakan tiga indikator implementasi Korten (1988) yaitu:
 - 1) Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, yaitu apa yang ditawarkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik kelompok sasaran. Aspek yang dikaji meliputi relevansi jenis bantuan modal usaha yang diberikan, serta aksesibilitas prosedur program.
 - 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu meneliti kompatibilitas antara tuntutan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan kapasitas organisasi pelaksana, yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung. Hal ini mencakup analisis terhadap kecukupan sumber daya (anggaran dan personel) yang dialokasikan untuk kegiatan implementasi, terutama untuk pendampingan intensif dan monitoring berkelanjutan yang disyaratkan oleh program.
 - 3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu menganalisis kualitas interaksi dan hubungan timbal balik antara Dinas Sosial dan kelompok pemanfaat pasca-penyerahan bantuan. Kajian akan diarahkan untuk memahami sifat hubungan yang terjalin, apakah bersifat partisipatif atau hanya instruktif, serta frekuensi dan responsivitas organisasi dalam menanggapi masalah yang dihadapi kelompok.
2. Identifikasi faktor yang menghambat implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didefinisikan sebagai tempat dimana objek studi atau fenomena yang diteliti diimplementasikan dan dilaksanakan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 12, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung.

Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di cakupan regional. Pemilihan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai dinamika operasional program, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi *outcome* UEP dari perspektif badan pelaksana kebijakan di wilayah Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif berbentuk susunan kata-kata (baik lisan maupun tertulis), tindakan atau perilaku yang diobservasi, serta data pendukung tambahan, seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer: menurut Bungin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi (2011), data primer didefinisikan sebagai informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber asli di lokasi atau objek penelitian. Data jenis ini memiliki karakteristik tidak tersedia dalam format yang terkompilasi atau siap pakai, tetapi sebaliknya, data wajib diperoleh langsung dari narasumber yang merupakan sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Pihak-pihak yang diwawancarai mencakup individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan Ketua serta anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu, observasi juga dilaksanakan terhadap tahapan persiapan pelaksanaan program UEP.
- 2) Data sekunder: merujuk pada jenis informasi yang tidak dihimpun secara langsung dari narasumber di lapangan, melainkan diperoleh melalui studi dokumen, arsip, atau berbagai bentuk data yang telah tersedia dan terkompilasi sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diekstraksi dari berbagai dokumen formal, seperti laporan kegiatan UEP, regulasi terkait program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pedoman teknis dan operasional (juknis/juklak)

program, serta literatur yang relevan mengenai tata kelola program pemberdayaan masyarakat miskin.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai serangkaian prosedur sistematis yang diterapkan untuk menghimpun informasi yang relevan dan esensial, yang kemudian akan digunakan sebagai basis untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian (Noor, 2011). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu metode pengumpulan data yang bersifat deskriptif, dapat berupa gejala yang telah diklasifikasikan, atau dalam bentuk lain seperti dokumentasi visual, dokumen resmi, dan catatan lapangan yang disusun selama proses penelitian berlangsung. Dalam proses pelaksanaannya peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui :

1. Wawancara

Wawancara sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara dua pihak. Dalam interaksi tersebut, satu pihak memiliki tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak lainnya, melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang spesifik (Hasan dkk., 2009). Dalam konteks penelitian ini, pewawancara berperan sebagai fasilitator utama untuk mendapat informasi secara mendalam dari responden mengenai implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Oleh karena itu, informan kunci ditetapkan sebagai sumber informasi utama yang memiliki pengetahuan komprehensif terkait fokus riset. Daftar informan yang terlibat dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Jabatan/Posisi	Data yang Dicari
1	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Latar belakang program, tujuan & kebijakan, mekanisme penentuan penerima bantuan, faktor penghambat pelaksanaan program
2	Staff pelaksana program UEP	Proses pelaksanaan program, mekanisme penyaluran bantuan, hambatan teknis & administrasi, kesesuaian sumber daya
3	Pendamping/koordinator lapangan	Peran pendampingan, monitoring & evaluasi, keberlanjutan usaha

4	Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kesesuaian program, interaksi dengan Dinas Sosial
5	Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Perubahan pada <i>outcome</i> personal, kesesuaian jenis usaha dengan keahlian, pemahaman
6	Kepala Desa/Kelurahan	Mekanisme atau frekuensi koordinasi Dinsos dengan Desa setelah modal disalurkan, bentuk pembinaan

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Wawancara dilakukan untuk menggali data terkait implementasi program UEP dari dua sisi, yaitu organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Peneliti mewawancarai pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mengetahui mekanisme pendampingan, proses seleksi kelompok, serta kendala administratif yang dihadapi. Sementara itu, wawancara terhadap kelompok sasaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, bagaimana kualitas interaksi dengan pendamping, serta dinamika yang terjadi pada kelompok tersebut.

Wawancara dilaksanakan dalam beberapa waktu kunjungan, yaitu pada tanggal 5, 7, dan 12 Januari, serta 15 Februari 2026. Lokasi wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan di lokasi usaha masing-masing kelompok sasaran untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara adalah adanya keterbatasan jumlah informan dari pihak kelompok sasaran, peneliti hanya melakukan wawancara mendalam terhadap 3 kelompok usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelompok lainnya yang sudah tidak aktif atau anggotanya sulit untuk ditemui karena sudah beralih profesi. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan kedalaman informasi pada informan yang tersedia untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai faktor penyebab menurunnya komitmen kolektif dan hambatan komunikasi yang terjadi antara kelompok dengan organisasi pelaksana.

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengamati dan mencatat fakta-fakta yang relevan bagi peneliti, dengan tujuan menyajikan perspektif yang holistik mengenai fenomena yang dikaji (Rukajat, 2018). Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah persiapan pelaksanaan program Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) di Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan fokus pada peran Dinas Sosial sebagai pelaksana utama program, dan observasi kondisi fisik dan kelayakan sumber daya. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana praktik implementasi program UEP dijalankan. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengamati kondisi fisik alat bantuan yang diberikan, serta kelayakan lokasi usaha terkait ketersediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat konsistensi kehadiran pendamping di lapangan serta bagaimana respons dinas terhadap kendala teknis yang dialami oleh kelompok sasaran pasca-penerimaan bantuan.

Observasi dilaksanakan dalam beberapa waktu kunjungan lapangan, yaitu tanggal 7 dan 12 Januari, serta 15 Februari 2026. Lokasi observasi dilakukan lokasi operasional KUBE penerima bantuan, di antaranya KUBE Sinar Jaya di Kabupaten Lampung Selatan dan KUBE Menjahit serta Delima di Kota Metro. Kendala yang dihadapi dalam observasi yaitu keterbatasan peneliti dalam mengamati interaksi antara dinas dan kelompok secara *real-time* karena jadwal kunjungan dinas yang tidak terjadwal secara rutin (*insidental*). Oleh karena itu, observasi lebih difokuskan pada aspek kondisi fisik bantuan yang masih atau sudah tidak beroperasi, ketersediaan fasilitas pendukung di lokasi usaha, serta bukti-bukti administratif pendampingan yang dapat diakses di lapangan untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antara program dan kebutuhan nyata kelompok sasaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai proses perekaman terhadap peristiwa yang telah berlangsung atau sudah terjadi (Sujarweni, 2014). Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data melalui berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti laporan kegiatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pedoman pelaksanaan program, catatan usaha, serta dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Lokasi pengumpulan dokumentasi dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan lokasi usaha KUBE Sinar Jaya serta KUBE

Delima dan Modista. Waktu pengambilan dokumentasi mengikuti jadwal pelaksanaan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dokumentasi adalah lemahnya sistem pengarsipan data historis di tingkat kelompok sasaran. Peneliti menemui kesulitan dalam memperoleh catatan keuangan yang sistematis mengenai pendapatan kelompok sebelum dan sesudah menerima program UEP. Selain itu, terdapat hambatan dalam mengakses data mutakhir mengenai status keberlanjutan kelompok karena tidak adanya basis data evaluasi berkala yang terdokumentasi dengan baik oleh organisasi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan triangulasi data dengan memaksimalkan dokumentasi foto kondisi fisik alat saat ini serta mencocokkan hasil wawancara untuk merekonstruksi gambaran perkembangan ekonomi kelompok sebagai pengganti ketiadaan catatan keuangan formal tersebut

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini akan meliputi tahap pengumpulan, kemudian melakukan penyederhanaan data, dilanjutkan dengan penyajian data, dan diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan. Untuk tahap penyederhanaan dan penyajian data, digunakan model interaktif yang berfokus pada pengolahan data secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengumpulan data. Selanjutnya, data yang telah diolah akan melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan keakuratan hasil penelitian (Miles dkk., 2014). Berikut ini tahapan dalam melakukan teknik analisis data:

1. Pengumpulan data

Proses analisis data pada penelitian ini diawali dengan tahapan pengumpulan data di lapangan. Tahap awal ini secara spesifik mencakup observasi intensif untuk mengamati dan mendokumentasikan fenomena atau kejadian yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya, dilakukan penyusunan instrumen wawancara, dan pengambilan dokumentasi baik visual maupun audio untuk melengkapi penjelasan fenomena sekaligus mempermudah analisis data. Data yang terkumpul kemudian direduksi, dianalisis, dan disajikan secara sistematis,

seperti laporan mengenai pelaksanaan program usaha ekonomi produktif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pendukung. Keabsahan data dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi sumber agar hasil analisis dapat dipercaya dan valid.

2. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan tahap analisis yang melibatkan penyederhanaan, penentuan fokus, seleksi, transformasi, dan pengabstraksian data dari catatan lapangan serta transkrip wawancara. Tujuan utama dari proses awal ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghimpun data primer yang memiliki tingkat relevansi tinggi, sehingga mampu menjadi basis data yang solid guna mendukung proses analisis. Analisis tersebut pada akhirnya harus selaras dan didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Kondensasi data merupakan aktivitas yang berlangsung secara berkelanjutan atau terus-menerus, bahkan proses penyaringan dan pemadatan data tersebut dapat dimulai sebelum data aktual dikumpulkan di lapangan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan prosedur sistematis untuk mengorganisasi informasi dengan tujuan mempermudah pemahaman dan analisis. Proses ini memiliki fungsi krusial, yaitu untuk membantu peneliti dalam merumuskan kesimpulan yang akurat serta memfasilitasi pengambilan keputusan atau tindakan yang tepat dan berbasis data. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam format narasi deskriptif yang diperkuat dengan ilustrasi berupa gambar atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan sebelumnya melalui deskripsi maupun gambaran mengenai hasil analisis implementasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sesuai dengan teori implementasi Korten (1988), serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada standar kebenaran dari temuan penelitian. Kriteria ini secara spesifik lebih menekankan pada kualitas data atau informasi yang dihimpun, daripada semata-mata mengukur sikap dan jumlah responden yang terlibat dalam proses pengumpulan data (Husnullail dkk., 2024). Terdapat empat kriteria yang umum digunakan dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji konfirmabilitas (*confirmability*) (Purwanto, 2022). Untuk menjamin derajat keabsahan dan akurasi data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan empat kriteria standar pemeriksaan data ilmiah. Penerapan keempat kriteria tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil rekonstruksi data lapangan mengenai implementasi program UEP memiliki derajat kepercayaan yang tinggi dan sesuai dengan realitas empiris. Dalam memenuhi kriteria ini, peneliti menerapkan triangulasi karena kemampuan esensialnya untuk membandingkan informasi dari berbagai perspektif, yang sangat diperlukan untuk menganalisis kesenjangan adaptasi sistemik yang menjadi fokus utama sebuah penelitian (Nurfajriani dkk., 2024).

- a) Triangulasi sumber: ini melibatkan perbandingan dan pengecekan kembali data yang sama yang berasal dari sumber informan yang berbeda yang memiliki peran kontras dalam implementasi UEP. Data dari pelaksana program mengenai kendala pendampingan akan dikonfrontasikan dengan informasi dari Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengenai hilangnya kontak interaksi, serta dikonfirmasi oleh Kepala Desa sebagai aktor lokal yang mengamati proses implementasi di lapangan.
- b) Triangulasi teknik: ini dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan melalui teknik yang berbeda. Hasil wawancara akan divalidasi dengan observasi melalui analisis dokumen.

2. Uji transferabilitas (*transferability*)

Kriteria ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diimplementasikan atau diterapkan pada konteks dan situasi sosial di tempat lain (Susanto & Jailani, 2023). Guna memenuhi aspek transferabilitas, peneliti menyusun deskripsi hasil penelitian pada bab IV secara sangat rinci, jelas, sistematis, dan mendalam. Melalui konteks pemaparan yang utuh tersebut, pembaca maupun peneliti selanjutnya dapat menangkap esensi dinamika program UEP ini secara komprehensif apabila ingin menerapkan model kajian serupa di daerah lain.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan untuk membuktikan dependensi (keandalan) serta konsistensi seluruh proses penelitian (Mekarisce, 2020). Peneliti menempuh kriteria ini melalui proses audit eksternal yang dibimbing secara berkala oleh dosen pembimbing skripsi. Audit dilakukan terhadap keseluruhan aktivitas penelitian, mulai dari penentuan fokus masalah, pelacakan data lapangan, interpretasi temuan, hingga penarikan kesimpulan, sehingga seluruh tahapan penelitian terbukti objektif dan dapat dipertanggungjawabkan keandalannya.

4. Uji konfirmabilitas (*confirmability*)

Uji konfirmabilitas atau uji objektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kajian ini benar-benar objektif dan bersumber murni dari data empiris di lapangan, bukan hasil prasangka atau subjektivitas peneliti (Susanto & Jailani, 2023). Peneliti mengonfirmasikan setiap narasi hasil pembahasan dengan bukti-bukti faktual yang otentik, seperti rekaman suara wawancara, catatan lapangan, dokumentasi foto, serta arsip data kepustakaan resmi Dinas Sosial Provinsi Lampung.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, proses implementasi program UEP belum berjalan secara optimal karena belum tercapainya keselarasan menyeluruh dalam tiga dimensi kesesuaian menurut teori Korten (1988). Secara lebih terperinci, potret implementasi program UEP tersebut dapat dijabarkan melalui tiga poin kesesuaian sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran

Aspek ini menunjukkan hasil yang cukup sesuai, namun belum optimal. Bantuan modal usaha yang disalurkan seperti peralatan usaha dinilai telah menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk produktif. Namun, efektivitasnya terhambat karena penetapan jenis bantuan belum sepenuhnya berbasis pada pemetaan keahlian riil dan kondisi pasar lokal yang dihadapi oleh kelompok sasaran.

- b. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksan

Aspek ini menunjukkan ketidaksesuaian (*mismatch*) yang cukup mendasar. Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan program, tetapi secara operasional mengalami keterbatasan kapasitas. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah personel, keterbatasan anggaran operasional,

serta tidak adanya skema baku untuk melakukan pengawasan, pendampingan, dan evaluasi berkala setelah bantuan diserahkan.

c. Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana

Aspek ini menunjukkan hubungan yang belum sesuai dan bersifat pasif. Interaksi dan komunikasi antara Dinas Sosial dengan masyarakat penerima manfaat cenderung terputus setelah prosesi penyerahan bantuan selesai. Kelompok sasaran mengalami kesulitan untuk menyampaikan keluhan usaha, sementara organisasi pelaksana tidak memiliki mekanisme umpan balik yang adaptif untuk merespons dinamika kendala yang dihadapi kelompok di lapangan.

2. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berbagai faktor penghambat yang menyebabkan implementasi program UEP di Provinsi Lampung mengalami ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Kapasitas operasional dan anggaran yang terbatas

Hambatan struktural utama bersumber dari keterbatasan alokasi anggaran operasional untuk pendampingan pasca-distribusi bantuan. Hal ini berdampak pada rendahnya intensitas kunjungan lapangan dan bimbingan teknis oleh organisasi pelaksana. Keterbatasan ini menyebabkan fokus program hanya berhenti pada tahap penyaluran aset tanpa dukungan finansial yang memadai untuk melakukan pengawalan berkelanjutan terhadap perkembangan usaha kelompok.

b. Lemahnya sistem pengawasan dan monitoring berkelanjutan

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme monitoring pasca-distribusi bantuan menyebabkan organisasi pelaksana kehilangan kendali atas perkembangan riil di tingkat kelompok. Hubungan yang hanya terjadi di awal program tanpa adanya tindak lanjut evaluasi membuat kendala teknis yang dihadapi kelompok, seperti kerusakan alat produksi atau kemacetan usaha, tidak terdeteksi sejak dini. Hal ini

menyebabkan bantuan yang diberikan rawan menjadi aset yang tidak produktif karena tidak adanya pengawalan yang berkesinambungan.

c. Minimnya penguatan kapasitas SDM dan inovasi

Hambatan muncul dari rendahnya frekuensi pendidikan dan pelatihan bagi staf pelaksana maupun kelompok sasaran. Fokus yang terlalu administratif mengakibatkan kurangnya transfer pengetahuan mengenai manajemen bisnis modern, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan jaringan pasar. Akibatnya, kelompok sasaran cenderung stagnan dan hanya bergantung pada permintaan pasar lokal yang terbatas.

d. Ketiadaan fasilitasi akses jaringan pasar

Kelompok sasaran menghadapi kendala yang cukup serius dalam memasarkan produk atau jasa mereka karena ketergantungan pada permintaan pasar lokal yang sangat terbatas. Organisasi pelaksana belum berperan optimal sebagai penghubung antara KUBE dengan pasar yang lebih luas atau sektor swasta. Tanpa adanya dukungan fasilitasi akses pasar, produktivitas kelompok menjadi stagnan dan tidak mampu memberikan dampak peningkatan pendapatan yang signifikan bagi anggota.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik yang bersifat teoretis bagi perkembangan ilmu administrasi publik maupun bersifat praktis bagi instansi pelaksana di lapangan. Adapun implikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan pelajaran (*lesson learned*) berharga yang memperkuat teori kesesuaian Kortzen (1988). Temuan di lapangan membuktikan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak bisa dinilai secara linier atau selesai begitu saja ketika bantuan modal diserahkan.

Implikasi teoretisnya menegaskan bahwa jika organisasi pelaksana kaku dan abai terhadap proses pembelajaran serta adaptasi pasca-distribusi, maka hubungan kesesuaian dengan kelompok sasaran akan terputus. Ini menunjukkan bahwa dalam studi implementasi kebijakan pemberdayaan, variabel pendampingan yang adaptif adalah jangkar utama (*core variable*) yang menentukan hidup atau matinya sebuah program.

2. Implikasi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi langsung sebagai peta perbaikan strategis bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam mengelola program UEP ke depan. Dinas Sosial tidak boleh lagi memosisikan diri hanya sebagai penyalur bantuan, melainkan harus bertransformasi menjadi pembina dan pendamping. Implikasi praktisnya adalah perlunya mereformasi sistem monitoring standar, menyediakan tenaga pendamping yang kompeten di lapangan, serta menyusun skema evaluasi berkala agar bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak berhenti, melainkan benar-benar mampu menstimulus kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam rangka mengoptimalkan implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di masa mendatang.

1. Mengoptimalkan pendampingan dengan pemerintah setempat

Guna memastikan keberlanjutan pengawasan dan respon cepat terhadap kendala di lapangan, Dinas Sosial disarankan untuk membangun pola koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat desa atau kelurahan di lokasi KUBE berada. Sinergi ini penting agar pemantauan harian terhadap perkembangan usaha kelompok dapat terintegrasi dengan peran aparat kewilayahan sebagai otoritas terdekat. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul di tingkat kelompok dapat segera ditangani secara kolaboratif

tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jadwal kunjungan resmi dari dinas provinsi.

2. Redesain alokasi anggaran berbasis skala prioritas dan keberlanjutan usaha

Mengingat keterbatasan anggaran daerah dan risiko kegagalan program akibat bantuan yang tidak tepat guna, Dinas Sosial disarankan untuk melakukan redesign alokasi anggaran dengan mengedepankan kualitas pendampingan daripada sekadar kuantitas pengadaan barang. Hal ini dapat dilakukan melalui pengalihan sebagian porsi belanja modal untuk biaya operasional pelatihan teknis dan bimbingan manajerial yang intensif bagi setiap kelompok sasaran. Adanya prioritas anggaran pada penguatan kapasitas manusia ini sangat penting agar setiap unit mesin yang diserahkan sudah disertai dengan kesiapan sumber daya pengelola yang mumpuni, sehingga risiko pemborosan anggaran akibat bantuan yang mangkrak dapat diminimalisir melalui investasi pada kompetensi penerima manfaat.

3. Membangun mekanisme pelaporan berkala

Mengingat belum tersedianya sistem pelaporan rutin dari kelompok sasaran kepada organisasi pelaksana, Dinas Sosial disarankan untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang praktis dan tidak memberatkan bagi penerima manfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana komunikasi yang sudah akrab digunakan oleh masyarakat atau melalui koordinasi rutin dengan pendamping lapangan. Adanya pelaporan berkala mengenai perkembangan usaha ini sangat penting agar setiap kendala teknis di lapangan dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi tanpa terkendala oleh hambatan administratif yang rumit.

4. Optimalisasi mekanisme seleksi dan verifikasi kelayakan teknis

Guna menjamin bahwa bantuan alat produksi yang diberikan benar-benar sinkron dengan kapasitas sumber daya serta fasilitas yang tersedia di lapangan, Dinas Sosial perlu memperketat prosedur verifikasi terhadap kesiapan sarana pendukung dan kompetensi usaha kelompok. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan aspek teknis, seperti kecukupan daya listrik atau kelayakan ruang

produksi, serta rekam jejak motivasi usaha telah teruji secara objektif sebelum pendistribusian dilakukan. Melalui audit teknis yang matang di tahap awal, Dinas Sosial dapat memitigasi risiko pemanfaatan peluang oleh pihak yang tidak memiliki orientasi produktif, sehingga bantuan yang diserahkan diharapkan dapat segera dioperasikan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M. (2025). Peran Dinas Peindustrian dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 192-204.
- Aga, A. R. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 62-77.
- Agustine, F., & Pratiwi, A. (2021). Model Monitoring Pasca Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5(1), 20-25.
- Amroni, R. Z., & Simbolon, H. (2025). *Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral Dissertation). Jakarta: IPDN.
- Anirwan. (2025). *Konsep Teori Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Badan Penanganan Hukum Nasional. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Diakses pada 31 Agustus 2025, dari <https://bphn.go.id/data/documents/10pr015.pdf>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Bappenas. Diakses pada 31 Agustus 2025, dari <https://share.google/S1Dh1OJt3xTH11Uwj>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen*. Diakses pada 25 Februari 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung September 2025 Turun Menjadi 9,66 Persen*. Diakses

pada 25 Februari 2026, dari <https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1628/persentase-penduduk-miskin-provinsi-lampung-september-2025-turun-menjadi-9-66-persen.html>

- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Bregi, R. (2024). *Analisis Tahapan Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Pemerintahan.
- Damiti, S. M., Djaafar, L., & Lukum, R. (2025). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 81-89.
- Dara, A. (2026). *Analisis Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral Dissertation). Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural Dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64-71.
- Dinas Sosial Provinsi Lampung. (2024). *Petunjuk Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Dinas Sosial Provinsi Lampung. (2025). *Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4(422-431).
- Fajri, R., & Maulidiah, S. (2025). Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4), 864-881.
- Fauzan, M. A. A. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani di Kabupaten Bone* (Doctoral Dissertation). Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Gothwal, P., & Siwach, M. (2024). Outreach of The National Rural Livelihoods Mission Through Social and Financial Inclusion: Progress Since Its Inception. *Economic and Regional Studies*, 17(4).
- Gustian, K., & Lukman, A. I. (2025). Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) Dalam Bidang Ekonomi Di Rt 28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kota Samarinda. *Journal Pembangunan Sosial* 13(4).
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2024). Ketergantungan Masyarakat Miskin dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 97-112.
- Hermoko, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 124-135.
- Horman, T. E., Rompas, W. Y., & Londa, V. Y. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Dinas Sosial Kota Manado. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(10), 81-90.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.
- Indryani, G. W. & Mulyadi, A. W. E. (2022). Implementasi Program Inovasi Mitigasi Bencana Titip Bandaku di Kabupaten Klaten. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 141-155.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022>
- Islam, A. (2019). *Ultra-poor Graduation to Eradicate Extreme Poverty in Bangladesh: a case of BRAC*. Dhaka: BRAC University.
- Karmanis, & Karjono. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV Pilar Nusantara.
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Kumar, A., & Khan, I. (2025). Evaluation The Impact of NRLM on Poverty Alleviation in Himachal Pradesh: A factor Analysis Approach. *International Journal of Research in Finance and Management*, 8(1), 12-25.
- Makromy, M. Z., Aqilah, A., El Haq, M. S., & Habibi, M. (2025). Program Pemberdayaan Keluarga Dhuafa Bapak Usman Ismail Berupa Bantuan Modal Usaha. *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 3(1), 222-236.

- Marto, S. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Melik, N., Vestikowati, E., & Yuliani, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan* (Publication Manuscript). Ciamis: Universitas Galuh.
- Meytriana, A., Azahra, G. M., Khasanah, K. M., Artika, P. A., & Hotman, H. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(2), 478-493.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. USA: Sage Publications.
- Nento, H. P., Lahasan, R. D., & Salim, T. A. (2025). Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap Stabilitas Keuangan Usaha UMKM Dalam Situasi Ekonomi Yang Tidak Menentu. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 1-12.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Edisi Kesa)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Nurjanah, Y., Aulya, S., Sari, A. N. K. P., & Padilah, S. (2022). PKM Pendampingan UMKM Go Digital Pada UMKM Toko Abon Ikan Tongkol A&N dan UMKM Japlak Balandongan. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 3(2), 33-40.
- Nurrahman, S., Saefullah, A., Sitohang, R. M., Syaputra, R., & Hakim, M. P. (2024). Pemanfaatan Platform Digital E-commerce Tiktok & Shopee Affiliate Dalam Manajemen Resiko dan Ketahanan UMKM Budidaya Jangkrik dan Usaha Dimsum. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(1), 23-35.
- Nurseha, I., & Arafat, F. (2024). Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(02), 947-967.
- Olii, F., Popoi, I., & Bahsoan, A. (2021). Analisis Program Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 1-17.

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung. Diakses pada 10 Februari 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114093/perda-prov-lampung-no-24-tahun-2014>
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Diakses pada 3 Februari 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310346/pegub-prov-lampung-no-21-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Diakses pada 31 Agustus 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129477/permensos-no-2-tahun-2019>
- Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Pulungan, K. (2022). *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan*. (Doctoral dissertation). Padang Sisempuan: IAIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif, Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya.
- Putri, L. A., & Mukramin, S. U. (2023). Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 102-121.
- Qalsum, A. T. U., Memang, R., Putera, W., Wahyuti, W., Iriani, N., & Saripuddin, S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Modal Usaha. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 4(02), 148-160.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Edisi Pert). Kalimantan: Antasari Press.
- Rawati, I., & Bay, A. Z. (2025). Peningkatan Kapasitas Keluarga Melalui Peran Pendamping PKH Di Kabupaten Muna. *Journal Publicuho*, 8(2), 1090-1101.
- Rizki, G. (2026). Eektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Agile Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41-50.
- Rizky, D. (2025). *Dinamika dan Dampak Penyaluran Program Bantuan Sosial "Usaha Ekonomi Produktif" Terhadap Masyarakat Penerima di Kota Lhokseumawe*. (Doctoral Dissertation). Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.

- Rohillah, I., & Sulistiana, I. S. (2025). Komunikasi Kelompok dan Organisasi. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 193-204.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabrina, L., Primadani, D. C., Aisyah, S. N., Cahyaningrum, A. W., & Haikal, M. D. (2023). Peran Perempuan dalam Membangun Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kewirausahaan di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4668-4677.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Sarwaliya, M., & Tripathi, V. M. (2025). Impact of Self-Help Groups (SHGs) on Sustainable Livelihood Development in Rural Uttarakhand: A Study on The Influence of DAY-NRLM in Income Generation and Community Empowerment. *STM Journals*, 14(2), 46–54.
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *Modal Sosial dan Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Setianingsih, R., & Kharismahendra, A. (2023). Peran Manajemen Usaha dan Program Pendampingan Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada UMKM Mitra Kerja BMT Permata Indonesia Pekanbaru). *Jurnal Daya Saing*, 9(1), 31-40.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Banyumas: Zahira Media Publisher.
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori, dan Aplikasinya)*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitianm Pertunjukan. *Harmonia*, 11(2)(19), 173–179.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sukirman, S., Halimah, M., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 57-70.

- Sunarti, Z. (2024). Optimalisasi UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Bantuan Modal Usaha. *Akad: Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Akutansi Syariah*, 1(01), 42-49.
- Suratman. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Cianjur: Penerbit Adab.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *TARBIYAH: Journal of Educational Science and Teaching*, 2(1), 160-166.
- Ufah, H. A. (2023). *Evaluasi Program Bimbingan Sosial Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2021*. (Doctoral Dissertation). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.